

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

1. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

Dalam penerapan rencana pembangunan daerah, akan timbul permasalahan karena adanya kesenjangan ekspektasi antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan pembangunan yang direncanakan (RTRW, RPJM atau RPJP). Adanya kesenjangan ini juga terjadi karena adanya perbedaan antara target pembangunan ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil daerah saat dokumen rencana sedang disusun. Permasalahan pembangunan daerah ini harus identifikasi sehingga dapat dicari solusinya, dalam rangka penyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan.

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi. Dalam rangka penyusunan RPJP Kabupaten Ciamis, perlu diidentifikasi terlebih dulu permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Dalam penyelenggaraan pembangunan, urusan yang diserahkan kepada pemerintahan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan tambahan. Perumusan permasalahan pembangunan pada penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan tiap penyelenggaraan urusan pemerintah.

Rumusan permasalahan pembangunan ini menjadi dasar penyusunan program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Ciamis dalam jangka waktu 20 tahun mendatang.

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien merupakan dampak penerapan konsep desentralisasi. Di Indonesia, desentralisasi mulai dilaksanakan sejak tahun 1999 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberlakuan desentralisasi berarti adanya pembagian urusan dan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Terkait hal ini, urusan pemerintah daerah otonom terbagi atas 2, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan.

a) Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Wajib

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diseleenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat di daerah tersebut. Urusan Pemerintahan Daerah yang bersifat wajib meliputi 26 urusan. Adapun beberapa permasalahan pembangunan daerah pada Urusan Wajib dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan

Dalam rangka peningkatan pembangunan masyarakat di Kabupaten Ciamis, salah satu sektor yang mendapat perhatian adalah sektor

pendidikan. Setiap tahunnya porsi anggaran Urusan Pendidikan selalu meningkat sehingga diharapkan dapat meningkatkan pembangunan manusia melalui pendidikan, terutama perbaikan khususnya kuantitas dan kualitas pendidikan dasar dan menengah yang diharapkan dapat mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Permasalahan :

- a. Belum terlayannya anak usia 3-6 tahun di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-kanak;
- b. Masih adanya anak putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah terutama pada SMP/MTs dan SMA/SMK/MA;
- c. Belum optimanya standar kualifikasi DIV/S1 jenjang TK, SD, SMP, SMA/SMK;
- d. Masih kurangnya tenaga pendidik terutama untuk guru mata pelajaran dan guru produktif;
- e. Aksesibilitas Terhadap Sekolah Belum Merata di Beberapa Wilayah;
- f. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
- g. Sarana prasarana minimal pada jenjang SD/MI terutama perpustakaan dan laboratorium serta mebelair masih kurang;
- h. Kualitas dan Relevansi serta Tata Kelola Pendidikan belum Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan dalam Rangka Peningkatan Daya Saing;
- i. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan masih kurang;

2. Urusan Kesehatan

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dilakukan melalui berbagai upaya diantaranya adalah peningkatan sarana dan prasarana kesehatan sebagai pendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Permasalahan :

- a. Belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban pembiayaan kesehatan, khususnya bagi penduduk miskin;
- b. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas serta penyebaran sumber daya kesehatan;
- c. Peningkatan penyakit menular dan tidak menular yang berkontribusi besar terhadap kesakitan dan kematian;
- d. Masih terbatasnya kemampuan manajemen informasi kesehatan meliputi pengelolaan administrasi dan regulasi kesehatan;
- e. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh;
- f. Kesadaran terhadap perilaku bersih dan sehat dari berbagai kelompok masyarakat masih belum optimal;
- g. Fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan belum memadai;
- h. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan.

3. Urusan Pekerjaan Umum

Peningkatan infrastruktur merupakan salah satu program Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, dimana salah satunya adalah jaringan jalan yang baik sebagai penunjang perekonomian masyarakat serta peningkatan jaringan irigasi sebagai salah satu upaya peningkatan produksi pertanian khususnya produksi beras.

Permasalahan :

- a. Kemantapan jalan masih dibawah 60 %;
- b. Rasio irigasi dalam kondisi baik masih rendah;
- c. Belum semua desa memiliki instalasi air bersih;
- d. Rendahnya rasio saluran drainase dalam kondisi baik.

4. Urusan Perumahan

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian beserta fasilitas penunjangnya. Perbaikan sarana dan prasarana

dasar pemukiman perlu diupayakan secara berkelanjutan melalui berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pencapaian MDG's.

Permasalahan :

- a. Rasio rumah tidak layak huni masih 45 %.

5. Urusan Penataan Ruang

Penataan ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam rangka menciptakan keterpaduan serta keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya yang efisien untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) di suatu kawasan, merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam rangka menyeimbangkan penggunaan ruang perkotaan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan :

- a. Belum tersusunnya RTR/ RDTR KSK dan RDTR Kota/ Kecamatan
- b. Belum optimalnya penyebarluasan hasil penyusunan RTRW dan Rencana Ruang berdasarkan rencana detail per-Kecamatan atau per-KSK, yang dapat disosialisasikan pada masyarakat sebagai upaya pemanfaatan ruang.

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan pada suatu wilayah didokumentasikan melalui buku-buku perencanaan yang disusun secara bertahap. Buku-buku rencana tersebut terdiri dari RPJP, RPJM, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD. Setelah disusun dan disetujui oleh para pemangku kepentingan, buku rencana ini kemudian ditetapkan (dilegalisasi) menjadi Peraturan Daerah atau Peraturan/Keputusan Kepala Daerah. Peraturan ini menjadi sarana publikasi dan sosialisasi bagi pemerintah daerah sehingga masyarakat dan pihak swasta mengetahui dan dapat berpartisipasi mengimplementasikan rencana pembangunan daerah tersebut.

Permasalahan :

- a. Perhatian SKPD terhadap dokumen perencanaan masih kurang;
- b. Kemampuan SKPD dalam mengartikulasikan kebutuhan masyarakat masih kurang;
- c. Kemampuan keuangan daerah masih terbatas;
- d. Adanya ego atau kepentingan antarsektor yang seringkali dinyatakan sebagai kesulitan untuk melakukan koordinasi, sehingga persoalan yang bersifat lintas sektor seringkali ditangani secara parsial dan terfragmentasi sehingga cenderung tidak menyentuh atau menyelesaikan persoalan yang sebenarnya;
- e. Belum sinerginya proses perencanaan pembangunan nasional dari pendekatan politik ke pendekatan teknokratik;
- f. Masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan (program/kegiatan) pembangunan dan alokasi penganggarnya.

7. Urusan Perhubungan

Pelayanan pemerintah daerah pada sektor perhubungan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat, mengurangi resiko kecelakaan dan mengurangi kemacetan di daerah tersebut. Salah satu upaya pemerintah daerah di antaranya melalui pemasangan rambu-rambu lalu lintas secara bertahap di setiap titik-titik yang rawan akan kecelakaan dan juga peningkatan pengawasan terhadap kendaraan angkutan umum.

Permasalahan :

- a. Kualitas sarana prasarana transportasi darat belum optimal.

8. Urusan Lingkungan Hidup

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam lingkungan hidup adalah pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup antara lain disebabkan karena pengelolaan lingkungan tidak dilakukan dengan baik dan benar. Berbagai peraturan dan perundangan di bidang lingkungan hidup mensyaratkan ketentuan teknis dan

administrasi yang harus ditaati oleh seluruh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan.

Permasalahan :

- a. Rendahnya rasio saluran drainase dalam kondisi baik
- b. Masih banyak rumah tangga yang belum memiliki instalasi limbah;
- c. Masih rendahnya pelayanan persampahan.

9. Urusan Pertanahan

Penertiban lahan di Kabupaten Ciamis menjadi salah satu perhatian Pemerintah Daerah dimana sertifikasi tanah menjadi menjadi tolak ukur sebagai kepatian dalam kepemilikan tanah.

Permasalahan :

- b. Sertifikasi tanah kas desa dan tanah pemda masih rendah;
- c. Pengelolaan tanah pemerintah (Negara, Pemkab, Kas Desa) belum baik;
- d. Pengelolaan sistem informasi pertanahan belum tersedia;
- e. Pelayanan perijinan dan sertifikasi pertanahan belum optimal.

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Ciamis setiap tahunnya harus juga diimbangi oleh penertiban administrasi dokumen kependudukan.

Permasalahan:

- a. Validitas data penduduk belum optimal;
- b. Migrasi penduduk antar wilayah cukup tinggi;
- c. Sarana dan prasarana pendukung sistem informasi administrasi kependudukan masih sangat terbatas;
- d. Petugas khusus yang menangani administrasi kependudukan di tingkat desa belum tersedia;
- e. Kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan masih kurang.

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan. Perlindungan anak diarahkan untuk mewujudkan suatu kondisi yang menjamin hak dan tumbuh-kembang anak.

Permasalahan :

- a. Partisipasi perempuan dalam pembangunan masih kurang;
- b. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi;
- c. Kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak belum optimal;
- d. Anak jalanan, anak korban narkoba, anak terlantar dan anak putus sekolah masih ada.

12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Salah satu program nasional di dalam menekan laju pertumbuhan penduduk adalah Program Keluarga Berencana (KB).

Permasalahan :

- a. Tingginya angka drop out peserta KB;
- b. Pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi masih kurang;
- c. Tingkat partisipasi KB pria masih rendah;
- d. Kepesertaan pasangan usia subur tidak ber KB cukup tinggi;
- e. Pemberdayaan ekonomi keluarga belum optimal.

13. Urusan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan jumlah masyarakat miskin menjadi perhatian Pemerintah Daerah di dalam peningkatan kesejahteraan sosial.

Permasalahan :

- a. Prosentase KK miskin masih cukup tinggi;
- b. Gelandangan, pengemis, anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi masih ada;
- c. Kemandirian dan produktivitas penyandang cacat masih rendah;

- d. Peran kelembagaan kesejahteraan sosial belum optimal;
- e. Kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial belum optimal;
- f. Jumlah Bantuan PMKS masih terbatas.

14. Urusan Ketenagakerjaan

Tingkat migrasi penduduk yang keluar Kabupaten Ciamis setiap tahunnya meningkat, salah satu penyebabnya adalah keterbatasan lapangan pekerjaan di wilayah Kabupaten Ciamis.

Permasalahan :

- a. Kualitas tenaga kerja masih rendah;
- b. Tingginya tingkat pengangguran terbuka;
- c. Rendahnya akses terhadap lapangan kerja.

15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi sebagai salah satu lembaga perekonomian diharapkan sebagai penggerak roda ekonomi di suatu wilayah dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Peran koperasi sangat penting untuk peningkatan potensi usaha kecil yang dimiliki oleh masyarakat lokal, penyedia informasi serta sebagai lembaga distribusi dan pemasaran.

Permasalahan :

- a. Rendahnya SDM pelaku koperasi dan UMKM;
- b. Masih rendahnya daya saing produk Koperasi dan UMKM;
- c. Belum optimalnya kemitraan antar pelaku koperasi dan UMKM;
- d. Masih rendahnya akses Koperasi dan UMKM terhadap sumber daya produktif (permodalan, bahan baku, teknologi, sarana pemasaran dan informasi pasar).

16. Urusan Penanaman Modal

Salah satu indikator pertumbuhan di suatu wilayah adalah peningkatan jumlah investasi yang masuk.

Permasalahan :

- a. Belum optimalnya data potensi unggulan dan promosi potensi investasi;

- b. Belum optimalnya pelayanan perijinan dan penanganan pengaduan masyarakat;
- c. Pola kemitraan yang jelas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam hal investasi.

17. Urusan Kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu kekayaan daerah yang harus dijaga dan dilestarikan. Kebudayaan juga merupakan sarana promosi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Oleh karena itu, dalam rangka pelestarian budaya, salah satu langkah yang dapat dilaksanakan pemerintah daerah adalah revitalisasi kawasan dan situs cagar budaya. Selain itu, perlu diadakan sosialisasi atau seminar yang ditujukan kepada masyarakat agar menjaga dan melestarikan budaya yang merupakan kekayaan Kabupaten Ciamis.

Permasalahan :

- a. Belum optimalnya pemanfaatan seni budaya daerah sebagai daya tarik wisata;
- b. Kurangnya tenaga ahli dibidang seni, budaya, sejarah dan keurbakalaan sehingga optimalisasi pengembangan potensi seni, budaya, sejarah dan keurbakalaan yang masih belum bisa tergali secara maksimal.

18. Urusan Pemuda dan Olahraga

Jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam menyalurkan aspirasi dan kemampuannya dalam penyelenggaraan pembangunan, sedangkan jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kesehatan, kemampuan berkompetisi secara sehat dan kemampuan bekerja sama

masyarakat dan meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan daerah pada bidang olah raga.

Permasalahan :

- a. Akses dan kesempatan bagi pemuda yang tergolong tidak mampu untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan masih rendah;
- b. Jiwa kewirausahaan di kalangan pemuda masih rendah;
- c. Masalah sosial di kalangan pemuda seperti kriminalitas, narkoba, psikotropika, zat adiktif (NAPZA) dan HIV masih cukup tinggi;
- d. Sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olah raga belum mencukupi;
- e. Pembinaan olah raga belum optimal;
- f. Pembentukan karakter kepribadian pemuda belum optimal.

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri menitikberatkan pada kegiatan pembinaan terhadap LSM, Organisasi Masyarakat, OKP serta kegiatan pembinaan politik daerah. Pengetahuan politik masyarakat yang mulai meningkat seringkali tidak diimbangi dengan wawasan kebangsaan yang sesuai dengan nilai dan norma sehingga perlu dilakukan peningkatan dan optimalisasi dalam hal pembinaan.

Permasalahan :

- a. Gangguan keamanan dan ketertiban cenderung masih terjadi;
- b. Penegakan Perda belum optimal;
- c. Kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk mematuhi peraturan masih belum optimal;
- d. Sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban belum memadai;
- e. Jiwa nasionalisme dan patriotisme cenderung menurun;
- f. Kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi belum optimal.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Permasalahan :

- a. Potensi keuangan daerah belum tergali secara optimal;
- b. Pengadaan pegawai belum sesuai antara formasi riil dengan formasi pegawai yang ditetapkan Pemerintah;
- c. Kompetensi sebagian pegawai belum sesuai dengan kebutuhan riil;
- d. Penegakan hukum belum efektif;
- e. Produk hukum daerah masih banyak yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;
- f. SKPD belum semua memiliki Standar Pelayanan Minimal dan Prosedur Standar Operasional;
- g. Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan belum optimal;
- h. Pendataan aset yang belum terselesaikan dan adanya aset-aset yang belum tersertifikasi;
- i. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah serta belum sepenuhnya menjadi input perencanaan pembangunan.
- j. Belum optimalnya peran serta masyarakat dan stake holder dalam upaya penanggulangan bencana.

21. Urusan Ketahanan Pangan

Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang wajib diperhatikan oleh pemerintah daerah. Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial.

Permasalahan :

- a. Pengelolaan, ketersediaan dan keamanan pangan belum optimal;
- b. Pelaksanaan diversifikasi pangan masyarakat belum optimal;
- c. Sarana dan prasarana pendukung penyuluhan belum memadai

22. .Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) berfungsi sebagai sarana berorganisasi, berbagi informasi, penyaluran aspirasi serta peningkatan pengetahuan/kemampuan untuk masyarakat setempat dalam mendukung pembangunan lingkungannya, sedangkan Pemberdayaan

dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah (masyarakat) serta pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan, keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Permasalahan :

- a. Belum maksimalnya pelaksanaan program peningkatan pemberdayaan masyarakat perdesaan;
- b. Masih belum optimalnya peranan kelembagaan ekonomi perdesaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di perdesaan;
- d. Belum optimalnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. Pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat belum optimal;
- f. Kemampuan keuangan desa dalam pembangunan masih terbatas;
- g. Pengelolaan administrasi pemerintahan desa kurang tertib.

23. Urusan Statistik

Dokumen statistik suatu daerah dibutuhkan oleh pemerintah (daerah maupun pusat) dalam mendapatkan data kondisi dan perkembangan daerah tersebut secara umum sebagai bahan untuk menyusun rencana pembangunan serta rencana tata ruang, bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

Permasalahan :

- a. Penetapan data tunggal belum disepakati;
- b. Data sektoral dari SKPD kurang konsisten;
- c. Sarana dan Prasarana pengolahan data dan statistik belum memadai;

d. Kualitas SDM dibidang kestatistikan belum memadai.

24. Urusan Kearsipan

Peningkatan kemampuan pengelolaan arsip mutlak diperlukan dalam Pemerintahan sebagai bagian dari tertib administrasi.

Permasalahan :

- a. Sarana dan prasarana pengelolaan perpustakaan belum memadai;
- b. Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia belum memadai;

25. Urusan Komunikasi dan Informatika

Keberadaan sarana komunikasi dan informatika yang memadai di setiap SKPD sangat diperlukan untuk mengetahui informasi secara up to date terutama berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai sarana koordinasi internal dan external SKPD di Kabupaten Ciamis.

Permasalahan :

- a. Sarana dan prasarana teknologi informasi belum memadai;
- b. e-government belum diimplementasikan secara optimal;
- c. Kualitas sumberdaya manusia belum memadai.

26. Urusan Perpustakaan

Peningkatan kuantitas dan kualitas perpustakaan perlu dilaksanakan dalam rangka mendorong terciptanya masyarakat yang berkualitas. Selain itu, masyarakat juga perlu didorong untuk memanfaatkan pelayanan berupa perpustakaan untuk meningkatkan pengetahuan, kapabilitas serta kualitas hidupnya.

Permasalahan :

- a. Sarana dan prasarana pengelolaan perpustakaan belum memadai;
- b. Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia belum memadai;
- c. Minat baca masyarakat masih rendah.

b) Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Pilihan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan Pemerintahan Daerah yang bersifat pilihan meliputi 8 urusan. Adapaun beberapa permasalahan pembangunan daerah pada Urusan Wajib Pilihan diuraikan sebagai berikut :

1. Urusan Pertanian

Kontribusi sektor pertanian ini dinilai cukup besar, mengingat kondisi geografi dan masyarakat Kabupaten Ciamis sebagian besar bekerja pada sektor pertanian. Pertanian dalam hal ini adalah pertanian dalam arti luas, termasuk pertanian tanaman pangan, buah-buahan, sayuran, peternakan dan perkebunan. Potensi pertanian dan tingginya kontribusi pertanian terhadap PDRB masih belum sebanding dengan perbaikan taraf hidup petani.

Permasalahan :

- a. Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura sangat dipengaruhi oleh cuaca dan iklim;
- b. Sarana dan prasarana penunjang untuk peningkatan produksi dan produktivitas tanaman masih terbatas;
- c. Keterbatasan bahan baku dan bibit ternak;
- d. Belum optimalnya penyediaan pakan dan bibit ternak unggul;
- e. Keterbatasan SDM peternakan;
- f. Masih terbatasnya sarana dan prasarana peternakan;
- g. Kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh belum memadai;
- h. Kualitas SDM pelaku utama dan pelaku tambahan usaha masih rendah

- i. Belum adanya zonasi klaster komoditas perkebunan unggulan;
- j. Belum berkembangnya industri pengolahan hasil perkebunan;
- k. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perkebunan;
- l. Belum optimalnya sarana pemasaran

2. Urusan Kehutanan

Pemerintah daerah harus pemeliharaan ketat terhadap kawasan hutan dan penegakan hukum yang tegas terhadap perubahan guna lahan di lahan kritis untuk mencegah terjadinya bencana (berupa banjir, kekurangan air, erosi, longsor, dsb).

Permasalahan :

- a. Belum optimalnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- b. Belum optimalnya pemanfaatan potensi hasil hutan;
- c. Belum optimalnya Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan;
- d. Belum optimalnya Perencanaan dan Pengembangan Hutan;

3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Pengembangan sumber daya energi dan mineral sangat diperlukan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup manusia, diantaranya kebutuhan akan tenaga listrik bagi kehidupan.

Permasalahan :

- a. Rendahnya rasio elektrifikasi rumah tangga

4. Urusan Pariwisata

Pemerintah Daerah dalam mengelola objek-objek wisatanya diharapkan tetap meningkatkan promosi, kondisi lingkungan, kenyamanan dan fasilitas pendukung tiap objek wisatanya agar tetap mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan objek wisata lain.

Permasalahan :

- a. Belum optimalnya Pengembangan dan penggalian Destinasi Pariwisata;

- b. Masih belum optimalnya kemitraan dalam menunjang pengembangan pemasaran pariwisata;
- c. Masih terbatasnya SDM kepariwisataan.

5. Urusan Kelautan dan Perikanan

Perikanan di Kabupaten Ciamis sebagian besar berupa perikanan darat, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan potensi perikanan darat di Kabupaten Ciamis dengan melaksanakan pembinaan terhadap para peternak ikan dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas ikan yang dihasilkan.

Permasalahan :

- a. Belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan sarana budidaya perikanan;
- b. Kualitas SDM pembudidaya ikan masih rendah;
- c. Masih rendahnya SDM pembudidaya.

6. Urusan Perdagangan

Urusan perdagangan memiliki peran yang sangat penting khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, karena salah satu faktor yang mempengaruhi angka PDRB adalah perdagangan.

Permasalahan :

- a. Belum optimalnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
- b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perdagangan;
- c. Belum optimalnya pengelolaan pasar.

7. Urusan Perindustrian

Dibidang perindustrian di kabupaten Ciamis, dititik beratkan pada upaya mengembangkan industri kecil dan menengah yang mampu berdaya saing dengan industri di sekitarnya.

Permasalahan :

- a. Masih rendahnya daya saing produk industri kecil dan menengah;
- b. Belum optimalnya promosi dan kerjasama antar pelaku IKM

8. Urusan Transmigrasi

Urusan ketransmigrasian pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui kerja sama antar daerah.

Permasalahan :

- a. Program transmigrasi masih sepenuhnya tergantung dari kebijakan pemerintah pusat;
- b. Relatif tingginya animo masyarakat untuk bertransmigrasi yang tidak sebanding dengan jumlah kuota dari pemerintah;
- c. Lokasi tujuan transmigrasi seringkali belum siap, baik sarana dan prasarana dan administrasi pertanahan.

2. Isu Strategis

Isu strategis dirumuskan dengan memperhatikan identifikasi permasalahan Kabupaten Ciamis, isu dunia internasional serta penelaahan kebijakan pembangunan nasional dan daerah lain di sekitar Kabupaten Ciamis. Perumusan isu strategis Kabupaten Ciamis dilaksanakan dengan memperhatikan kebijakan pembangunan jangka menengah nasional agar tercipta suatu keserasian dan keterpaduan dalam pembangunan. Analisis isu-isu strategis dilakukan untuk meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Dalam mengidentifikasi isu-isu strategis bukan hanya mempertimbangkan isu strategis daerah lain tapi juga kesesuaian atau sinkronisasi dengan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah nasional dan kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat.

Tabel 4.1
Isu Strategis Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Ciamis

Isu Strategis RPJMN Tahun 2010-2014		Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018		Isu Strategis RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019	
1	Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	1	Pertumbuhan penduduk dan persebarannya.	1	Kualitas dan kesempatan pendidikan
2	Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan	2	Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan.	2	Aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat
3	Penegakan Pilar Demokrasi	3	Pengangguran dan ketenagakerjaan.	3	Daya beli masyarakat
4	Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi	4	Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.	4	Ketahanan pangan
5	Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan	5	Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis	5	Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan
		6	Kualitas lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya Jabar Green Province.	6	Kemitraan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat dalam pembangunan
		7	Kualitas demokrasi	7	Iklm usaha
		8	Kecepatan dan ketepatan penanganan bencana serta adaptasi masyarakat terhadap bencana	8	Fasilitasi dan pembinaan pelaku UKM
		9	Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.	9	Pengembangan destinasi wisata
		10	Pelestarian nilai – nilai dan warisan budaya lokal	10	Pemberdayaan masyarakat
		11	Pengembangan Industri Wisata Jawa Barat	11	Penaggulangan bencana dab pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Isu Strategis RPJMN Tahun 2010-2014	Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019
	12 Penanggulangan penduduk miskin.	12 Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah dan perdesaan
	13 Pasar global dan Asean – China Free Trade Area (ACFTA)	13 Kapasitas keuangan daerah
	14 Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	14 Optimalisasi kinerja pemerintah daerah dan desa
	15 Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dan penertiban okupasi lahan tidur (HGU)	15 Kesenjangan pembangunan antar wilayah
	16 Ketahanan Pangan	
	17 Keamanan dan ketertiban daerah	

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan utama pembangunan daerah, isu strategis pembangunan nasional dalam RPJMN Nasional Tahun 2010-2014, dan isu strategis pembangunan provinsi dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, maka dirumuskan isu strategis pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 sebagai berikut:

1. Kualitas dan kesempatan pendidikan
2. Aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat
3. Daya beli masyarakat
4. Ketahanan pangan
5. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan
6. Kemitraan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat dalam pembangunan
7. Iklim usaha
8. Fasilitasi dan pembinaan pelaku UKM
9. Pengembangan destinasi wisata
10. Pemberdayaan masyarakat

11. Penanggulangan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
12. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah dan perdesaan
13. Kapasitas keuangan daerah
14. Optimalisasi kinerja pemerintah daerah dan desa
15. Kesenjangan pembangunan antar wilayah